



# Siapkan Penataan Permukiman Kumuh

● YULIANINGSIH

## Pemkot Yogyakarta juga menyiapkan raperda permukiman kumuh.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tahun ini siap memanfaatkan dana Rp 8,5 miliar untuk penataan kawasan permukiman kumuh. Sebagian besar kawasan kumuh yang akan ditangani ini berada di sekitar bantaran sungai.

"Lelang paket pekerjaan tersebut dilakukan di pusat dan seluruh pekerjaan sudah harus diselesaikan pada tahun ini juga," kata Kepala Bidang Permukiman dan Air Limbah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta Hendra Tantular, kemarin.

Tahun ini, Hendra mengatakan, Pemkot Yogyakarta sebenarnya memperoleh dana bantuan penanganan kawasan kumuh dari pemerintah pusat sebesar Rp 14,5 miliar. Namun, menurut dia, dari dana tersebut baru bisa dimanfaatkan 60 persennya atau Rp 8,5 miliar untuk tahun ini. Ia ber-

harap sisa dana sekitar Rp 6 miliar bisa dimanfaatkan tahun depan.

Hendra mengatakan, tahun ini dana akan dimanfaatkan untuk pengerjaan empat proyek penataan permukiman kumuh di tujuh wilayah di Yogyakarta. Keempat paket pekerjaan yang disiapkan tersebut masing-masing berada di Kelurahan Gowongan dan Suryatmajan sebagai paket pekerjaan pertama, dan di Kelurahan Brontokusuman dan Keparakan sebagai paket pekerjaan kedua. Selanjutnya paket pekerjaan ketiga akan dilakukan di Kelurahan Warungboto dan Pandeyan, sedang paket pekerjaan keempat dilakukan di Giwangan.

Menurut Hendra, beberapa pekerjaan yang akan dilakukan di tujuh wilayah tersebut di antaranya adalah jalan lingkungan, talut permukiman, saluran air hujan, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang akan dibangun di Keparakan dan Brontokusuman. "Jika paket pekerjaan penanganan permukiman kumuh tersebut menyasar dua kelurahan, maka akan dibangun penghubung berupa jalan lingkungan, drainase, atau jembatan sesuai kebutuhan wilayah," ujar dia.

Selain ditangani oleh Pemkot Yogyakarta, menurut Hendra, Pemerintah DIY juga mengerjakan penanganan permukiman kumuh dengan dana

bantuan dari pusat sebesar Rp 27 miliar. Hal ini, kata dia, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan penanganan kawasan kumuh dengan luas lebih dari 15 hektare ditangani oleh pusat. Pemerintah provinsi menangani kawasan kumuh dengan luas antara 10 hingga 15 hektare, dan pemerintah kabupaten/kota dengan luas kurang dari 10 hektare. Tahun ini Pemerintah DIY, melalui satuan kerja pembangunan permukiman, akan melakukan penanganan di Sungai Winongo.

Selain menyiapkan empat paket pekerjaan, Pemkot Yogyakarta juga menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai pencegahan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas perumahan di wilayahnya. Hendra mengatakan, Pemkot Yogyakarta memperoleh bantuan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyusun raperda tersebut. "Sudah ada kerangka yang diberikan, tinggal menyesuaikan dengan kearifan di daerah saja," kata dia.

Raperda ini, menurut Hendra, ditujukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru di Kota Yogyakarta, termasuk menjaga permukiman yang sudah ada agar tidak

kumuh. Selain itu, peraturan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh agar menjadi permukiman yang layak huni.

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 393/2014, kawasan tidak layak huni tersebar di 206 rukun warga yang terdapat di 36 kelurahan dengan total luasan 278,7 hektare atau delapan persen dari luas Kota Yogyakarta. Umumnya permukiman kumuh berada di sepanjang bantaran sungai, seperti Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajah Wong. Permukiman tersebut mengalami berbagai permasalahan seperti pelayanan air minum, air limbah, dan drainase.

Hendra berharap raperda tentang permukiman kumuh itu bisa segera rampung, sehingga dapat masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2016. "Raperda ini sangat penting dan mudah-mudahan bisa diprioritaskan dalam prolegda 2016 agar bisa segera dibahas dan ditetapkan," ujar dia.

Selain Kota Yogyakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memberikan bantuan serupa kepada lima daerah lain. Yaitu, Kota Bogor, Surakarta, dan tiga daerah lain di luar Jawa. ■ antara ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005